

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM (SPP)
BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN
GILIRENG, KABUPATEN WAJO**



Oleh:

SAHRUL RAMADANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611110418

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM (SPP)
BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN
GILIRENG KABUPATEN WAJO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

SAHRUL RAMADANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611110418

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP)
BUMdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng,
Kabupaten Wajo

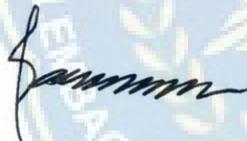
Nama Mahasiswa : Sahrul Ramadana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110418

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Lukman Hakim, M.Si

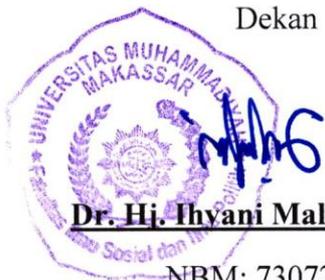
Pembimbing II



Syukri, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si

NBM: 730727

Ketua Program Studi


Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0226/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 730727

NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

()

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

()

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sahrul Ramadana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110418

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang Menyatakan,


Sahrul Ramadana

ABSTRAK

Sahrul Ramadana , Lukman Hakim , Syukri, Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokemntasi. Dengan informan penelitian yaitu ini terdiri dari 5 orang informan yang dipilih secara purposif yakni 1 orang pegawai kantor desa Polewalie, 2 orang pegawai BUMDes dan 2 orang masyarakat atau nasabah program simpan pinjam BUMDes.

Dengan hasil penelitian 1) Secara komunikasi yaitu koordinasi dan komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie secara berkala telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga komunikasi dalam Implementasi Program Simpan Pinjam disemua pihak sudah berjalan dengan baik. 2) Secara sumber daya dalam hal ini anggota BUMDes di Desa Polewalie telah dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dibutuhkan dalam program kerjanya yaitu Simpan Pinjam, sehingga sumber daya manusia dalam Implementasi Program Simpan Pinjam sudah cukup baik untuk saat ini. 3) Disposisi atau sikap, pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Simpan Pinjam dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai aturan yang disepakati. Dengan ini Implementasi Program Simpan Pinjam di Desa Polewalie dapat terus berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Struktur Birokrasi, secara struktur birokrasi BUMDes di Desa Polewalie sudah berjalan dengan baik, meliputi struktur organisasi, pengurus, dan Nasabah Program Simpan Pinjam.

Kata Kunci : BUMdes. Implementasi, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis haturkan dan panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) BUMdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos. M.Ap selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Syukri, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua saya bapak Ruslan dan Ibu Rasida, saudara kandung saya Muhammad Ilham, ST dan Lutfiana serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Teman saya selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi dalam suka maupun duka yaitu, Satria Arianto, Aldi Saputra dan Noer Mauliya B terima kasih telah menjadi support system terbaik
7. Segenap keluarga besar HiperMawa Komisariat Gilireng telah menjadi rumah kedua dalam berproses dalam banyak hal yang ada di luar kampus
8. Segenap Manajemen BUMDes Mallongi-longie Desa Polewalie telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian.
9. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Insyaa Allah. Semoga mendapat lindungan, berkah, dan karunia dari Allah Swt kepada bapak, ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya. Aamiin Ya Rabbal Aamiin

Jazakumullahu Khairan Katsiran

Billahi Fii Sabilil Haq. Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2024

Sahrul Ramadana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	40
D. Fokus Penelitian.....	41
E. Deskripsi Fokus Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian	51

C. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah suatu aspek penting yang dapat memajukan suatu bangsa, dimana tidak lepas dari peran pemerintah karena pemerintah menjadi salah satu penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam namun kebanyakan masyarakat memiliki pendapatan kecil dan besarnya pengeluaran.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dibentuk berdasarkan potensi desa sesuai dengan tujuan BUMDes yang tertuang dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya

memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).

Program usaha yang umumnya dijalankan adalah program simpan pinjam seperti yang dilakukan oleh BUMDes Mallongi longie di desa Polewalie Kecamatan Gilireng. BUMDes Mallongi longie menyalurkan dananya untuk dijadikan modal usaha ataupun modal berkebun/berternak mengingat daerah ini merupakan daerah yang masyarakatnya aktif bertani dan berternak. Adapun Anggaran yang diberikan pemerintah desa Polewalie untuk menjalankan usaha simpan pinjam ini dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	ANGGARAN	NASABAH
1.	2021	Rp. 250.000.000	65 orang
2.	2022	Rp. 292.000.000	74 orang
3.	2023	Rp. 321.500.000	70 orang

Tabel 1.1 anggaran dana Bumdes

Berdasarkan pengamatan penulis dengan fakta dilapangan bahwa ada masyarakat yang sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman modal dari BUMDes kehidupannya mulai berubah dan ada beberapa masyarakat yang kehidupannya tidak berubah, dikarenakan ada beberapa masyarakat yang meminjam modal tidak digunakan sesuai dengan keperluan awal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. “Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”
2. Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. “Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”
2. “Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”

Manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk membangun kapasitas peneliti dan pengembangan ilmu administrasi publik, serta memperkaya hasil penelitian yang ada dan

memberikan gambaran yang berfokus pada Implementasi program simpan pinjam BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

2. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Implementasi program simpan pinjam BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan Penelitian serupa dikemudian hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajria (2021) dengan judul “Pengaruh Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir” Mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara simpan pinjam badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang berada pada interval 0,80-1,000 maka antara Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Ekonomi termasuk korelasi yang signifikan sangat kuat berpengaruh dengan koefisien determinasi sebesar 0,904 atau (90,4%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh simpan pinjam badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 90,4% artinya pengaruh yang diberikan oleh simpan pinjam badan usaha milik desa tanjung raya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sangat kuat. Artinya dengan adanya simpan pinjam BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal ini perekonomian masyarakat ditandai dengan para nasabah BUMDes mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan masyarakat sudah mampu menabung dan

menyekolahkan anak-anaknya kejenjang menengah atas.(“Nurfajria,” 2021)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Khairia (2022) dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang kabupaten Kampar” Mengungkapkan bahwa Bumdes dalam meningkatkan program nya simpan pinjam yang dikhususkan untuk para masyarakat yang untuk membantu usaha mereka supaya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penelitian ini,sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai implementasi Program Bumdes simpan pinjam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ,maka dapat ditarik kesimpula sebagai berikut:

- a. Secara Komunikasi yaitu koordinasi dan komunikasi,sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu Program BUMDES simpan pinjam di Desa Kemang Indah dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak Bumdes kepada masyarakat .sehingga Komunikasi dalam implementasi program simpan pinjam disemua pihak sudah berjalan dengan baik.

- b. Secara Sumber Daya yang memiliki oleh masayarkat Di Desa Kemang Indahdalam pemilihan sumber daya untuk terlibat dalam anggota simpan pinjam suda berjalan dengan baik.

c. Disposisi atau sikap pelaksana implementator bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksana program Bumdes simpan pinjam yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tugasnya masing-masing.

d. Secara Struktur Birokrasi ada dua yaitu struktur organisasi sudah berjalan dengan baik, dan pihak dari BUMDEs simpan pinjam, pengurus dan anggota simpan pinjam sudah memenuhi secara struktur birokrasi. ("Nadia Khairia," 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Zumrotus S, Adi Susiantoro, dan Yusuf Hariyoko dengan judul "Implementasi Program Bumdes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)" mengungkapkan bahwa Sumberdaya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes ini secara kualitas sangat kurang. Dari segi kualitas, sumberdaya yang ada tidak terlalu faham IT sehingga masih minim paham teknologi. Sumberdaya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaan program BUMDes, karena dana yang dikucurkan pemerintah daerah maupun desa dalam bentuk bantuan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, para pelaksana berharap ada bantuan dana yang cukup sehingga bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi dan menambah fasilitas yang ada. Apalagi program yang paling diandalkan hanya ada pada kios jadi pendapatan program BUMDes yang utama ada pada pesewaan

kios. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama para pelaksana BUMDes. Dalam komunikasi yang mereka lakukan belum memiliki pola komunikasi yang baik dan tidak ada jadwal rutin pertemuan para lembaga desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya pada saat urgent saja. Kurangnya sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi pemerintah daerah ke desa-desa mengenai kebijakn BUMDes maupun sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan sehingga masyarakat tidak nurut saja sama apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes dikarenakan program kerja BUMDes karena tidak semua program berjalan dan BUMDes sendiri masih dalam tahap pengembangan. (zumrotus & susiantoro, n.d)

B. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

Sedangkan menurut para ahli terdapat beberapa pendapat tentang pengertian implementasi, diantaranya :

- 1) Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. (Nurdin Usman, 2002)
- 2) Syaukani dkk (2004), implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.
- 3) Wahab (2005: 65), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menguji hal ini dengan memverifikasi pemahaman tentang apa yang akan terjadi setelah suatu keputusan ditetapkan, atau dengan merumuskan fokus kebijakan implementasi.

b. Tujuan Implementasi.

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama. Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara

keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

c. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi suatu proyek atau rencana dapat berjalan dengan baik dengan dipengaruhi beberapa faktor terkait. Beberapa diantaranya yakni:

1) Pemahaman target yang dituju

Ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah proyek. Diperlukan adanya konsep dan langkah-langkah yang matang dan harus tercapai untuk mencapai tujuan. Siapa target implementasi yang dituju? Apakah yang dituju butuh rencana ini dapat diimplementasikan? Contohnya kebijakan publik, apakah masyarakat memerlukannya?

2) Pengadaan Sumber Daya

Penting untuk mencari sumber daya agar mampu menguraikan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan implementasi. Contohnya dalam suatu bisnis, jika peralatan tidak memadai ditambah dengan kualitas kinerja pegawai yang kurang optimal maka rencana bisnis sebaik apapun tidak akan bisa dieksekusi dengan baik. Seberapa Detail Menganalisis Resiko Tim implementasi menggunakan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah. Jika suatu rencana gagal untuk diterapkan, lalu apa kemungkinan terburuknya? Bagaimana penanganannya? Jauh lebih menguntungkan jika

dilakukan atau tidak dilakukan? Jika semua jawaban belum dapat terjawab dengan pasti, maka rencana harus dipertimbangkan ulang.

3) Menghargai Waktu Tenggang

Cantumkan waktu penyelesaian yang ditargetkan dan tenggat waktu untuk mulai implementasi. Hal ini akan berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan, sebab harus sadar porsi kerjanya masing-masing agar implementasi dapat berjalan dengan segera. Meskipun jadwal proyek dapat berubah seiring kemajuan proyek, penting untuk menggarisbawahi tanggal jatuh tempo yang diharapkan selama perencanaan implementasi.

d. Unsur-Unsur Implementasi

★ Dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28) pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan, dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2) Adanya Program Yang dilaksanakan

Suatu Kebijakan Publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan sebagai program atau kegiatan. program atau kegiatan merupakan rencana yang komperensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3) Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target grup atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan meminta barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

e. Teori Implementasi Kebijakan Edwards III

George Edward III (Nugroho, 2009;512) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*, dikatakannya, *without effotive implementation the decision of policymakers will not be carried out succesfull*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi (*communication*)

Berkenaan dengan upaya dan tercapainya pemahaman substansial sebuah kebijakan publik oleh implementor. Indikatornya adalah implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan yang harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Hal ini mengurangi penafsiran yang berbeda-beda pada sebuah kebijakan publik.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proses implementasi. Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3) Disposisi (*Disposition*)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Selain itu, pandangan yang berbeda antara implementator dan perumus kebijakan akan menjadikan implementasi sebuah kebijakan tidak tepat sasaran dan jauh dari ketercapaian tujuan dan keberhasilan.

4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi lebih jauh dari efektif.

2. Program

a. Pengertian Program

Secara bahasa kata program berasal dari bahasa Inggris *programme* yang artinya acara atau rencana. Sedangkan menurut istilah program adalah rancangan asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Program adalah rancangan acara dalam segala hal yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena pada hakikatnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari program.

Menurut Widoyoko (2016) program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Sedangkan Menurut Ruslan Abdul Ghani (2017) program adalah upaya yang dibagi dalam tipe-tipe pekerjaan secara terperinci sesuai dengan tata laksana dan pekerjaannya.

Dari pengertian program yang telah dipaparkan terdapat dua alasan mengapa program menjadi sesuatu yang penting dan harus disusun yaitu:

- 1) Lebih Efektif Dengan adanya program maka semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat disinkronkan dengan unit atau defenisi kepengurusan yang sudah dibuat.
- 2) Lebih Efisien Dengan adanya program maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu banyak sehingga waktu selama

kepengurusan waktu lainya bisa dipakai untuk merealisasikan program lainya yang sudah dibuat.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai:

1) Dasar Penetapan Program

- a) Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e) Strategi pelaksanaan.

Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang telah diuraikan.

Untuk penetapan program, tentunya berporos pada pembaruan kegiatan yang sedang berjalan atau yang akan dilakukan sebagai usaha terencana. Semua itu harus didasari oleh alasan yang jelas, serta mengarah pada terwujudnya sebuah program yang baik, dalam arti yang seluasluasnya, bukan sekedar demi perubahan itu sendiri. Program merupakan sebuah rancangan bagian dari sebuah kegiatan yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan. Tujuan program adalah sasaran atau maksud yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan yang

direncanakan. Tujuan program dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya menunjukkan out put dari program jangka panjang sedangkan tujuan khusus, out putnya jangka pendek.

2) Proses Pengembangan Program

Sebelum program dilaksanakan maka ada beberapa kebutuhan yang perlu di analisis sebagai acuan dalam langkah penilaian dari proses pengembangan program. Adapun langkah-langka yang diambil berdasarkan pengembangan SDM sebagai berikut:

a) Penentuan Kebutuhan

Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam memperkirakan permasalahan yang ada sekarang ataupun tantangan masa depan yang diharapkan dapat teratasi. Penentuan kebutuhan menyangkut dana yang harus didedikan untuk membiayai kegiatan (program).

b) Penentuan Program

Dalam menentukan sebuah program harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai, misalnya salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, maka program yang dibuat harus sesuai dengan sasaran tersebut.

c) Pelaksanaan Program

Pada langkah ini pelaksana harus menyiapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti

adanya program simpan simpan dan pengelola pasar dan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat desa disekitar

d) Evaluasi program

Langkah terakhir ini, sebagai penilaian dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyelenggara kegiatan akan menilai seberapa berjalanya kegiatan tersebut. Dari penilaian yang ada, pihak BUMDes akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berpengaruh terhadap masyarakat desa sekitar.

Uraian di atas dapat ditegaskan bahwa program adalah proses melaksanakan suatu kegiatan yang telah tersusun secara terstruktur agar bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan mendatangkan hasil ataupun pengaruh terhadap kegiatan yang telah terlaksana.

3. Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa

a. Simpan Pinjam

Kredit simpan pinjam merupakan usaha membantu golongan ekonomi lemah. Simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh badan usaha milik desa. Simpan pinjam dianggap mampu menjadi salah satu opsi yang mudah bagi perangkat desa dalam membuat usaha bumdes.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1) Pengertian BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 6, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengertian tersebut, maksud kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurus badan usaha ini terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dengan kata lain, pengelolaan badan usaha ini berbeda dengan pengelolaan pemerintah desa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk atas inisiasi masyarakat atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berdiri berdasarkan landasan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa Dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” Hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah

daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintrah daerah, potensi da keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

2) Tujuan BUMDes

Seperti badan usaha pada umumnya, pendirian BUMDes memiliki beberapa tujuan. Hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes pasal 3. Tujuan pendirian BUMDes adalah:

a) Meningkatkan perekonomian desa

Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan perekonomian desa:

- (a) Mengembangkan produk usaha masyarakat
 - (b) Mengembangkan sektor pertanian
 - (c) Mengelola desa wisata
 - (d) Mengembangkan sektor perikanan
 - (e) Mengembangkan sarana olahraga
 - (f) Mengelola sektor pemasaran
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau perolehan sumber lain yang sah. Dengan demikian, aset desa merupakan kepunyaan desa. Badan usaha ini dapat mengelolanya untuk meningkatkan pendapatan desa. Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 10, aset desa yang dapat dikelola BUMDes adalah:

- (a) Kekayaan asli desa
- (b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa

- (c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
 - (d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - (e) Hasil kerjasama desa
 - (f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

Dalam meningkatkan ekonomi desa, ada beberapa hal yang bisa menjadi hambatan:

- (a) Tidak ada sumber pendanaan.
- (b) Sulit mendapatkan informasi dan pasar.
- (c) SDM yang relatif rendah.
- (d) Produk yang kurang memiliki daya saing.

Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan cara:

- (a) Meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar.
- (b) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan.
- (c) Fasilitas pengembangan usaha mikro
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

Sebagai bentuk kerja sama antar desa, dua desa atau lebih dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pendirian ini tentunya telah disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari:

- (a) Pemerintah desa
- (b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- (c) Lembaga kemasyarakatan desa
- (d) Lembaga desa lainnya
- (d) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

Tujuan lain dari pendirian entitas ini adalah menciptakan peluang usaha dan jaringan pasar untuk menyokong kebutuhan warga desa. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan jaringan pasar, BUMDes perlu menciptakan tim pemasaran dan platform digital Badan Usaha Milik Desa.

- f) Membuka lapangan kerja

Salah satu tujuan BUMDes adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Ini bisa menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mengantisipasi kondisi perekonomian yang memburuk.

- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tujuan lain dari pendirian BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya sejalan dengan tujuan sebelumnya dari pendirian BUMDes, yakni membuka lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya warga desa yang bekerja berkat BUMDes, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa pun meningkat.

- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Tujuan terakhir dari pendirian BUMDes adalah meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Pengelolaan BUMDes yang sehat tentu mampu mendukung pendapatan keduanya. Karena itu, pemerintah desa perlu memberikan perhatian khusus bagi BUMDes.

3) Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yakni: unit perdagangan unit jasa keuangan, dan unit produksi, berdasarkan buku pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, unit yang berda didalam

struktur organisasi BUMDes secara umum data dikelompokkan menjadi 2 yaitu:Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam. Dan Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisatadesa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, BUMDes memiliki fungsi untuk memenuhikebutuhan masyarakat desa. Adapun Fungsi BUMDes bagi pemerintah desa dalam (Yabbar&Hamzah,2016) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi intermendasi dana masyarkat guna memacu pemupukan modal masyarkat dan penigkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
2. Fungsi pendamping dilakukan sebagai upaya penigkatan kapasitas usaha masyarakat pedesaan
3. Fungsi social sebagai dukungan terhadap bantuan sosial dan modal social
4. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan asli desa

Berdasarkan pemaparan diatas,peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa,meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarkat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemeratan ekonomi pedesaan

sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk memwadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan.

4) Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Prinsip BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan perencanaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa atau inisiatif masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Maka penting untuk diuraikan agar mudah dipahami dan dimengerti secara seksama dan dalam pemahaman yang satu oleh pemerintah yang satu oleh pemerintah desa, anggota (BUMDes), Bpd, pemerintah daerah, dan masyarakat tentunya. Adapun 6 prinsip sebagai berikut:

a) Kooperatif, semua komponeen yang terlibat didalam BUMDEs harus mampu melaukan kerjasama yang baik dan memiliki solidaritas yang tinggi guna membangun dan mengembangkan berjalanya unit-unit sesuai yang diinginkan.

b) Parsitipatif, semua komponen yang dalam BUMDEs harus mampu memiliki jiwa sosial yang tinggi secara sukarela untuk diminta dalm pemberian dukungan dan konstribusinya dalam mendorong kemajuan dan berkembang nya unit-unit Usaha BUMDes.

- c) Transparan, seluruh kegiatan yang ada di BUMDEs dalam peningkatan kapasitas masyarakat secara umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dimengerti dan terbuka.
- d) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDEs harus diberlakukan secara sama tidak pilih kasih dengan membedakan lapisan ataupun Setara, golongan, suku, dan agama.
- e) Akuntabel, seluruh kegiatan yang ada harus bisa dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- f) Sustainable (berkelanjutan), kegiatan usaha baru harus bisa dikembangkan, dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam bentuk wadah BUMDes.

Terkait dengan alokasi dana desa atau yang sering disebut dengan (ADD), Maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDEs diharapkan bisa lebih berkembang dan berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopangan yakni ketersediaannya permodalan dari dana desa yang cukup besar, sehingga memungkinkan untuk menyediakan permodalan yang cukup dengan membvagon unit-unit usaha yang baru untuk mendirikan BUMDes.

Jika semuanya berlaku dan sejalan, maka akan terjadi peningkatan desa yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa baik dari segi saran dan prasarana. Hal yang paling penguatan kooperatif agar tidak terjadi kesenjangan sosial

dintara lapisan masyarakat guna membangun bersama-sama sama menjalin keterikatan dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi daya dorong dan motivasi tersendiri dari masyarakat terhadap peningkatan kapasitas dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Dengan memanfaatkan waktu luang serta etos kerja yang baik.

5) Dasar Hukum BUMDes

Landasan hukum pendirian BUMDes adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6) Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

- a) Bisnis Sosial, Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar pada model usaha seperti BUMDes tidak menargetkan keuntungan profil. Jenis bisnis ini seperti simpan pinjam, dan pengolaan pasar desa dan sebagainya.
- b) Keuangan, BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas Usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa
- c) Bisnis Penyewaan, Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya
- d) Lembaga Perantara, BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas

meuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai rentenir.

- e) Perdagangan, BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan, Misalnya BUMDes mendirikan pom bensin bagi kapal-kapal didesa, bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.
- f) Usaha Bersama, BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam dalam kegiatan itu.
- g) Kontraktor, Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan pada proyek desa.

7) Sumber Dana BUMDes

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)

Aturan pendanaan desa pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Dana yang berasal dari APBN ini nantinya akan ditransfer ke dalam APBD Kabupaten/Kota. Setelahnya, dana tersebut disalurkan ke desa-desa untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, dan juga kegiatan swadaya masyarakat, termasuk BUMDes.

b) Pinjaman Modal Usaha

Sama seperti usaha lainnya, BUMDes juga dapat meminjam modal usaha kepada Bank. Untuk meminimalisir resiko kredit macet, BUMDes dapat mengajukan pinjaman Kredit tanpa Angunan (KTA) yang banyak dinilai lebih menguntungkan dan minim resiko

c) Tabungan/ Gotong Royong Masyarakat Desa

Apabila masyarakat disebuah desa telah sepakat untuk mendirikan BUMDes secara bersama-sama, modal dapat dikumpulkan secara sukarela dari masyarakat desa. Dana yang telah dihimpun dapat dikelola oleh pemerintah Desa atau Organisasi BUMDes untuk dialokasikan pada usaha yang hendak dijalankan.

d) Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai bentuk pengalihan hak secara sukarela kepada orang lain. Dalam dunia bisnis, hibah dapat dipahami sebagai pemberian dana kepada pelaku usaha secara sukarela untuk kepentingan usahanya. Melalui hibah usaha BUMDes akan

dimodali oleh pihak penghibah secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan keuntungan.

e) Investor

Investasi berarti menanam modal. Harapan dari dilakukannya investasi adalah memperoleh keuntungan setelah usaha telah berjalan. Melalui cara ini, BUMDes harus mencari pihak yang bersedia menanamkan modal untuk usahanya.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian

Istilah “kesejahteraan masyarakat” terdiri dari dua kata, yaitu “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kesejahteraan berasal dari kata dasar “sejahtera” yang berarti suatu keadaan yang menunjuk pada kondisi yang baik, yaitu suatu kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan masyarakat dapat berarti sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sejahtera adalah tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dengan keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu

mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2013) dalam "Pembangunan Ekonomi", menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, di mana

pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Kesejahteraan masing-masing individu bisa berbeda-beda, karena bersifat subyektif. Sehingga faktor-faktor untuk menentukan tingkat kesejahteraan juga berbeda. Dalam buku *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera* (2018) karya Endang Rostiana, konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep kemiskinan. Menurut Endang, pendefinisian serta pengukuran tingkat kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan pendefinisian dan pengukuran tingkat kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, keluarga sejahtera adalah: Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antaranggota dan antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1). Faktor Intern.

Faktor intern yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah :

- a) Jumlah anggota keluarga. Besar kecilnya jumlah anggota keluarga sangat mempengaruhi kesejahteraan, hal tersebut berkaitan dengan tercukupinya kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya.
- b) Tempat tinggal. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati.
- c) keadaan sosial keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
- d) keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi : keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

2). Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah:

- a) Manusia, meliputi : rasa iri hati, fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma.
- b) Alam, meliputi : bahaya (bencana) yang ditimbulkan oleh alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit.
- c) Ekonomi negara, meliputi : pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi, dan lain sebagainya.
- d) Nilai hidup, yaitu sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya. Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan, yang meliputi : faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup, dan faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.

c. Indikator masyarakat sejahtera.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menjelaskan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah:

a) Kependudukan (*Population*).

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu negara. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

b) Kesehatan dan Gizi (*Health and Nutrition*).

Tingkat kualitas kesehatan dan keterpenuhan gizi masyarakat merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

c) Pendidikan (*Education*).

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan

pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat masyarakat memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum.

d) Ketenagakerjaan (*Employment*).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, di mana masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain :

- (a) tingginya tingkat pengangguran.
 - (b) rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka.
 - (c) rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - (d) masalah pekerja anak.
- e) Taraf dan Pola Konsumsi (*Consumption and Pattern*).

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran

untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, atau dengan kata lain, pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

f) Perumahan dan Lingkungan (*Housing and Environment*).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketenteraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

g) Kemiskinan (*Poverty*).

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi

yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Semakin kecil angka kemiskinan berarti semakin dekatnya ketercapaian kesejahteraan masyarakat.

h) Sosial Lainnya (*Other Social Concerns*).

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti : berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Semakin derasnya arus globalisasi antar negara semakin membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

d. Upaya kesejahteraan masyarakat

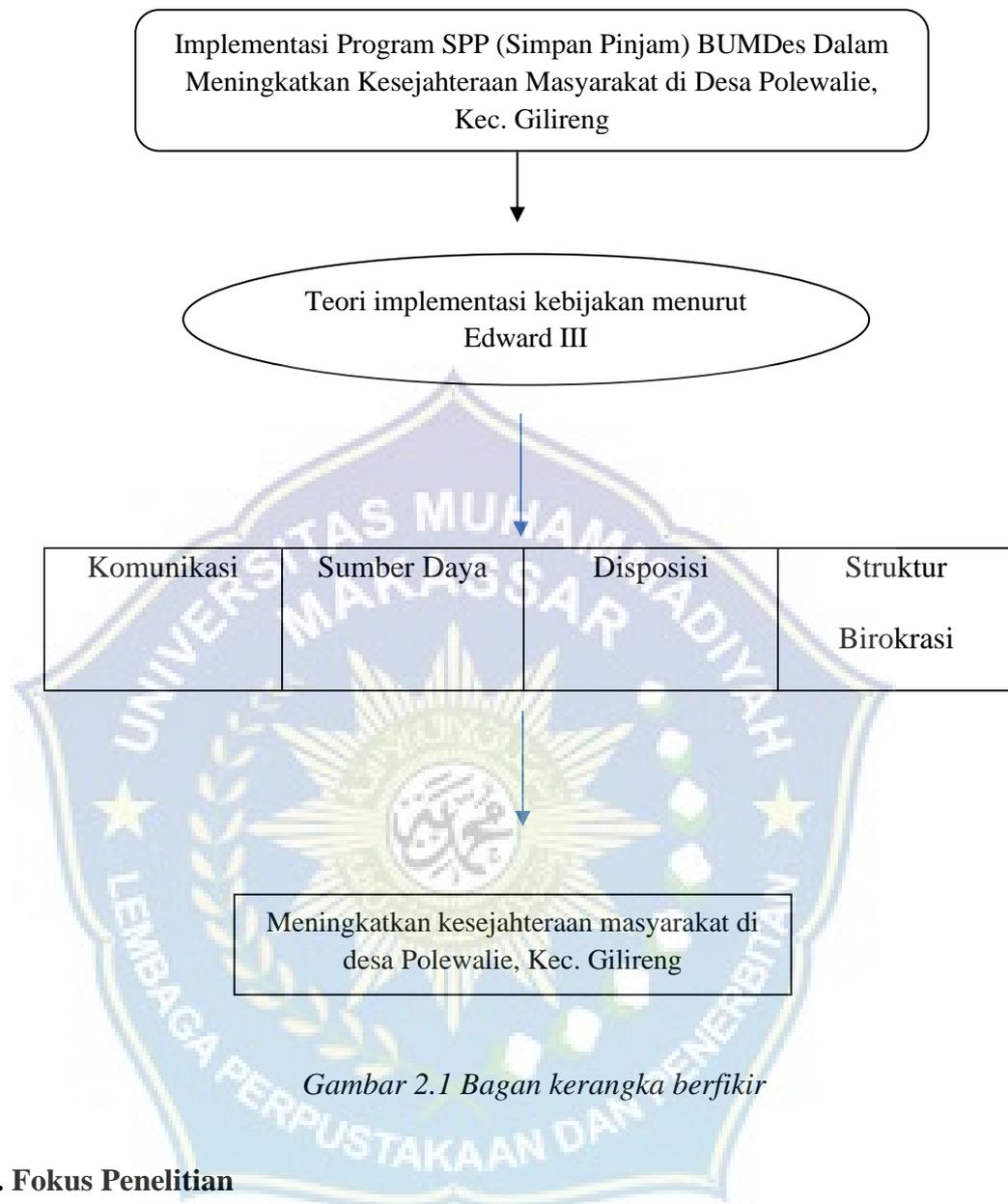
Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- 1) Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
- 2) Menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohani.
- 3) Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis.
- 4) Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal.

Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyusun program, salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dapat melakukan pengembangan-pengembangan potensi yang ada di daerah untuk membangun UMKM.

C. Kerangka Pikir

Untuk menjelaskan jalanya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dapat dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dapat dilihat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus Penelitian ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program simpan pinjam BUMdes desa polewalie.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub sub fokus dari penelitian Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie, kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ini, adalah :

1. Komunikasi adalah sarana untuk menyebarkan informasi dengan cara sosialisasi, dimana kepala desa dan anggota BUMDes mensosialisasikan program simpan pinjam tersebut pada saat musyawarah desa.
2. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi simpan pinjam agar berjalan efektif. Untuk menunjang keberhasilan implementasi simpan pinjam BUMDes ini sumberdaya yang diperlukan adalah sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi/Sikap adalah sikap kepala desa dan masyarakat dalam mendukung sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tentang Program Simpan Pinjam ini.
4. Struktur Birokrasi yang dimaksud adalah suatu yang melibatkan beberapa tim khusus untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa polewalie.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September tahun 2023. Lokasi penelitian berada di kantor BUMDes Polewalie kecamatan Gilireng.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postitivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai kunci instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata dalam bentuk uraian yang diperoleh dari informan dan perilaku subyek yang diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, sehingga yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng. Diantaranya :

- a. Kepala Desa Polewalie
- b. Ketua BUMDes Polewalie
- c. Sekertaris BUMDes Polewalie
- d. Bendahara BUMDes Polewalie
- e. Masyarakat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai media seperti majalah, Koran, bulletin, buku, jurnal dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh bertujuan untuk mendukung dan memperkuat data primer yang didapatkan selama melakukan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini. Informan yang dipilih dengan dengan teknik purposif adalah teknik pengambilan data

dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan yang di maksud ialah Kepala Desa, pegawai dan masyarakat yang terlibat dalam program simpan pinjam BUMDes di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng

NO	NAMA	JABATAN
1	Muliadi, S.pd	Kepala Desa
2	Sundari, SE	Ketua BUMDes
3	Firman, S.pd	Bendahara BUMDes
4	Muhammad Ilham, ST	Sekretaris
5	Rasida	Masyarakat

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

Berdasarkan tabel informan, penelitian ini terdiri dari 5 orang informan yang dipilih secara purposif yakni 1 orang pegawai kantor desa Polewalie, 2 orang pegawai BUMDes dan 2 orang masyarakat atau nasabah program simpan pinjam BUMDes. Informan diatas adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan dan melengkapi informasi tentang penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi secara

objektif, nyata, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai Implementasi Program SPP (Simpan Pinjam) di desa Polewalie Kecamatan Gilireng

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang dianggap banyak mengetahui mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data hasil dari observasi dan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan melalui dua cara yaitu:

a) Triangulasi

Metode ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Didalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dimana pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan sumber yang sama. Data yang diperoleh oleh informan kemudian dianalisis dan dilihat kesesuaian informasi akan dipilih untuk menjadi bahan pertimbangan kemudian ditarik kesimpulannya.

b) Member Check

Member check dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai berdasarkan dari apa yang telah diberikan oleh informan. Jika data tersebut telah sesuai maka data tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat 3 komponen yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, sehingga bisa berfokus pada hal-hal yang dianggap penting.

2. Penyajian data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi yang dikumpulkan secara tersusun oleh peneliti lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, data yang telah terkumpul kemudian diverifikasi agar data yang didapatkan terjamin keabsahan, objektif dan orisinal.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Polewalie

Desa polewalie merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu Desa Definitif, namun demikian secara Historis nama Desa Polewalie berasal dari kampung tua yang pada zaman dulu di daerah ini ada ular besar yang dianggap angker dan keramat, tidak ada yang bisa membunuhnya. Pada suatu saat bersatulah masyarakat akan membunuhnya dan datanglah masyarakat dari segala arah dan mengepung tempat ular tersebut untuk membunuhnya dan disinilah diartikan orang datang dari segala arah yang dalam bahasa bugisnya “POLEWALI”.

Desa Polewalie merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Gilireng. Pada tahun 1991 di Desa Polewalie dibentuk 2 dusun yaitu dusun Alelimpo dan dusun Awerange. Jumlah penduduk Desa Polewalie yaitu 871 jiwa, terdiri dari laki-laki 427 dan perempuan 444 dengan jumlah KK sebanyak 291.

2. Gambaran Geografis dan Letak Wilayah

Desa Polewalie terletak disebelah barat Ibukota Kecamatan Gilireng berbatasan dengan kelurahan Gilireng. Merupakan Daerah perbukitan dan pegunungan. Sangat cocok untuk perkebunan dan persawahan, secara geografis terletak antara 3,39'-4,16 LS dan 119,52'-120,27 BT, dengan

luas 11.20 km² dari luas Kecamatan Gilireng yang terdiri dari 2 dusun dan 4 RT.

3. Profil BUMDes Mallongi-Longie Desa Polewalie

BUMDes Mallongi-longie Desa Polewalie dibentuk pada tahun 2016 dengan struktur organisasi hanya terdiri dari ketua dan bendahara, kemudian pada tahun 2022 dilakukan perbaharuan struktur organisasi dan penyempurnaan administrasi.

4. Visi dan Misi BUMDes Mallongi-Longie Desa Polewalie

Visi BUMDes Mallongi-Longie mewujudkan desa mandiri berdikari dalam berusaha.

Misi BUMDes Mallongi-Longie :

- a. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian
- b. Memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Polewalie dalam mewujudkan kemandirian dalam segala bidang
- c. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) Polewalie untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat desa Polewalie
- d. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk di daya gunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerja sama yang baik.

5. Unit Usaha BUMDes Mallongi- Longie Desa Polewalie

BUMDes dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Polewalie. Sehingga program yang dijalankan saat ini adalah Usaha Simpan Pinjam (SPP), setiap pinjaman yang dilakukan secara berkelompok atau perorangan dengan batas maksimal Rp. 5.000.000.- dikenakan jasa sebesar 10% perkali bayar yaitu dalam jangka 6 bulan.

6. Modal Dasar BUMDes Mallongi-Longie Desa Polewalie

- a. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang dialokasikan bagi desa Polewalie
- b. Laba usaha ekonomi Simpan Pinjam (SPP)
- c. Laba usaha bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan kepala desa

B. Hasil Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, serta data dan dokumen yang menunjang penelitian Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”
2. Bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Polewalie, Kec. Gilireng ?”

Dari pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Empat variabel yang dimaksud yaitu *communication, resources, dispositions*

- **Implementasi Proogram Simpan Pinjam BUMDees dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

- 1. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy

implementors). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidak konsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Polewalie dalam Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) ini adalah dengan cara sosialisasi, dimana Kepala Desa Polewalie mensosialisasikan program simpan pinjam pada saat musyawarah desa dalam merumuskan rencana kerja pemerintah desa (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja desa

(APBD) tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh pemerintah Desa, BPD, Kelompok Tani, PKK, dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah.

Kepala Desa Polewalie menjelaskan bahwa Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) akan dilaksanakan pada kegiatan BUMDes dengan jumlah anggaran RP. 250.000.000 yang akan dilaksanakan tahun depan.

Pada kesempatan yang lain penulis sempat mewawancarai bapak Muliadi HS, S.Pd selaku Kepala Desa Polewalie tentang bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie, berikut sedikit kutipan wawancara kami :

“Jadi saya sudah mengatakan kepada anggota BUMDes itu sendiri bahwa Implementasi program simpan pinjam harus melibatkan langkah langkah seperti identifikasi calon peminjam, penetapan kebijakan suku bunga yang adil, pembentukan mekanisme pengawasan, dan kami harap nanti adanya pelatihan keuangan bagi peserta agar program dapat berjalan efektif“ (hasil wawancara MLD, 2 juli 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut penting untuk mengidentifikasi dengan cermat calon peminjam yang berpotensi memanfaatkan program simpan pinjam. Ini mencakup penilaian terhadap kemampuan mereka untuk memanfaatkan pinjaman dan memberikan manfaat positif bagi mereka dan komunitas.

Suku bunga yang diterapkan harus adil dan dapat diakses oleh anggota BUMDes. Penetapan kebijakan suku bunga yang adil akan mendukung tujuan inklusivitas dan pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Adanya mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program simpan

pinjam. Pengawasan dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pengurus BUMDes, pemerintah desa, atau pihak terkait lainnya.

Pelatihan keuangan bagi peserta merupakan langkah krusial untuk meningkatkan pemahaman anggota terkait manajemen keuangan, pengelolaan pinjaman, dan tanggung jawab finansial. Ini akan membantu memastikan bahwa program simpan pinjam berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

Pada kesempatan yang berbeda penulis mewawancarai ketua BUMDes yang bernama Sundari, SE Polewalie tentang bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie , berikut kutipan wawancara kami :

Terima kasih atas pertanyaannya. Implementasi Program Simpan Pinjam di Desa Poewalie melibatkan serangkaian langkah dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Pertama-tama, kami melakukan pertemuan dengan warga desa untuk memahami kebutuhan mereka dan menjelaskan manfaat serta tujuan dari program ini.

Kami memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi BUMDes serta kebutuhan nyata masyarakat kami. Sebagai Ketua BUMDes, kami merancang rencana operasional yang mencakup detail seperti skema pinjaman, tingkat bunga yang wajar, dan mekanisme pengembalian pinjaman.

Sosialisasi diadakan dengan cara yang inklusif, mengakomodasi masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Kami juga menerapkan kebijakan pintar, dengan menyesuaikan program ini sesuai dengan keunikan Desa Poewalie. Pendataan anggota sangat penting, dan kami melibatkan masyarakat dalam proses ini untuk memastikan keadilan dan transparansi.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Poewalie dilakukan dengan pendekatan

partisipatif dan berfokus pada kebutuhan serta keunikan masyarakat setempat. Beberapa poin kunci yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah: Partisipasi Masyarakat: Program melibatkan aktif partisipasi masyarakat Desa Polewalie, dimulai dari pertemuan untuk memahami kebutuhan dan menjelaskan manfaat program.

Keselarasan dengan Visi dan Misi BUMDes: Setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi BUMDes, menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan Operasional yang Matang: Sebagai Ketua BUMDes, terdapat perencanaan operasional yang matang, mencakup rincian skema pinjaman, tingkat bunga yang wajar, dan mekanisme pengembalian pinjaman. Sosialisasi Inklusif: Sosialisasi dilakukan dengan cara inklusif, mengakomodasi masukan dari berbagai lapisan masyarakat, dan kebijakan diterapkan secara pintar sesuai dengan keunikan Desa Polewalie. Pendataan Anggota untuk Keadilan dan Transparansi: Pendataan anggota menjadi prioritas untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan program.

Pada kesempatan yang berbeda penulis mewawancarai sekretaris BUMdes yang bernama Muhammad Ilham, ST Polewalie tentang bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie , berikut kutipan wawancara kami :

"Tentu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai Sekretaris BUMDes, saya bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan memastikan kelancaran operasional program ini. Langkah awal kami adalah melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi masyarakat melalui diskusi internal dan survei di Desa Polewalie.

Setelah mendapatkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan masyarakat, kami membantu Ketua BUMDes merinci rencana operasional program. Saya terlibat aktif dalam menyusun dokumen-dokumen administratif, seperti formulir pendaftaran anggota, perjanjian pinjaman, dan laporan keuangan.

Proses pendataan anggota sangat saya prioritaskan, dan saya bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap anggota tercatat dengan akurat. Sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan-pertemuan komunitas dan distribusi materi informatif. Saya juga berperan dalam memfasilitasi pertemuan anggota untuk menjelaskan prosedur pinjaman, bunga, dan tanggung jawab dalam pengembalian.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Melalui peran yang terorganisir dan keterlibatan aktif, Sekretaris BUMDes berperan penting dalam menjaga operasional dan kesuksesan program, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes.

Pada kesempatan yang berbeda penulis mewawancarai bendahara BUMdes yang bernama Firman, S.pd Polewalie tentang bagaimana Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Polewalie , berikut kutipan wawancara kami :

"Tentu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai Bendahara BUMDes, tugas utama saya adalah mengelola keuangan dan memastikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk mendukung Program Simpan Pinjam ini. Langkah pertama yang kami ambil adalah menyusun anggaran yang mencerminkan skala dan sasaran program, serta memastikan ketersediaan dana yang cukup.

Saya bekerja sama dengan Ketua dan Sekretaris BUMDes untuk membentuk sistem keuangan yang efisien dan transparan. Pada tahap awal, kami merancang struktur biaya yang jelas, termasuk skema bunga yang adil untuk anggota yang berpartisipasi. Proses ini melibatkan diskusi intensif dengan tim untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bendahara BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan

program dengan fokus pada manajemen keuangan yang efisien, transparansi, dan pemahaman yang mendalam terhadap risiko keuangan.

Pada kesempatan yang berbeda penulis mewawancarai masyarakat yang bernama Rasida yang pernah menjadi nasabah dari program simpan pinjam BUMDes ini, berikut kutipan wawancara kami :

“Menurut saya BUMDes memberikan akses keuangan yang lebih mudah, suku bunga yang wajar, dan dukungan perkembangan usaha juga cukup baik” (hasil wawancara RSD, 5 juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dimana BUMDes dianggap memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan. Ini dapat mencakup proses pendaftaran yang sederhana, persyaratan yang tidak terlalu rumit, dan pendekatan yang inklusif untuk memastikan bahwa anggota masyarakat desa dapat dengan mudah memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa BUMDes menetapkan suku bunga yang dianggap wajar oleh pembicara. Suku bunga yang wajar dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh BUMDes tidak memberatkan peminjam dan sesuai dengan kondisi ekonomi di tingkat desa.

BUMDes diakui memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan usaha. Ini bisa mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bimbingan, pelatihan, atau pendampingan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (staf) harus cukup dan cakap. Artinya bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap.

Sumber daya anggaran, Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sumber daya fasilitas, fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, menurut Edward dalam Winarno, ada dua bentuk informasi yang pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Bentuk kedua yaitu informasi berupa data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Kewenangan adalah sumber daya berikutnya yang ikut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa kewenangng cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam

melaksanakan suatu kebijakan. Ketika institusi dihadapkan pada masalah yang memerlukan penanganan yang cepat maka kewenangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Untuk menunjang keberhasilan implementasi program simpan pinjam (SPP) di Desa Polewalie ini, digunakan sumber daya manusia yang telah di atur dalam struktur organisasi BUMDes yaitu sebagai berikut :

Komisaris	: Mulyadi HS. S,Pd
Direktur	: Sundari, S.E
Bagian Administrasi (Administrasi)	: Nurul Amelia
Urusan Keuangan (Bendahara)	: Firman, S.Pd
Unit Usaha Pelayanan Umum dan Jasa	: Monika

Adapun wawancara penulis dengan Kepala Desa Muliadi HS, S.pd terkait sumber daya ini dapat dilihat sebagai berikut Bagaimana Sumber Daya di Desa Poewalie Mendukung Program Simpan Pinjam BUMDes?

"Sebagai Kepala Desa, peran saya sangat penting dalam memberikan dukungan penuh terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes. Saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Desa Poewalie. Sumber daya desa, seperti lahan dan infrastruktur, harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan program ini. Saya juga berkomitmen untuk memfasilitasi dialog antara BUMDes dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program ini dan menjawab kebutuhan nyata warga."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pembangunan desa secara komprehensif, dengan fokus khusus pada dukungan terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes.

Wawancara dengan Ketua BUMDes Sundari, SE: Bagaimana BUMDes mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung Program Simpan Pinjam?

Sebagai Ketua BUMDes, kami bekerja sama dengan Kepala Desa untuk memastikan pengoptimalan sumber daya. Kami merancang program dengan mempertimbangkan sumber daya finansial, lahan, dan tenaga kerja yang ada. Dukungan finansial dari BUMDes, ditambah dengan potensi lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai agunan pinjaman, menjadi salah satu strategi kami. Kami juga menggandeng masyarakat dalam kegiatan, memanfaatkan sumber daya manusia lokal untuk mendukung operasional program ini."

Berdasarkan wawancara diatas, pernyataan tersebut mencirikan peran strategis Ketua BUMDes dalam mengelola sumber daya secara efektif, berkolaborasi dengan pemerintah desa, dan melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung keberhasilan Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Poelewalie.

Wawancara dengan Anggota Masyarakat yang bernama Rasida: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Simpan Pinjam BUMDes dan bagaimana sumber daya lokal dimanfaatkan?

Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami sebagai anggota masyarakat berkontribusi dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemetaan kebutuhan. Selain itu, kami juga menggunakan lahan dan sumber daya lokal sebagai agunan pinjaman. Dalam hal ini, kami merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program."

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pelaku pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam memastikan keberhasilan Program Simpan Pinjam BUMDes di

Desa Poelewalie.

Wawancara dengan Bendahara BUMDes Firman, S.pd: Bagaimana peran keuangan dalam mendukung Program Simpan Pinjam dan bagaimana sumber daya keuangan dikelola secara efisien?

"Sumber daya keuangan menjadi pondasi utama bagi program ini. Sebagai Bendahara, kami berusaha memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung pinjaman kepada masyarakat. Sumber daya keuangan dikelola secara efisien dengan menyusun anggaran yang sesuai, memastikan transparansi dalam pencatatan keuangan, dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memitigasi risiko keuangan yang mungkin muncul."

Wawancara di atas mencerminkan bagaimana sumber daya, baik itu dari segi manusia, finansial, atau lahan, dapat dioptimalkan dan diintegrasikan untuk mendukung kesuksesan Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Poelewalie.

3. Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan missal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak

diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Wawancara dengan bapak Kepala Desa Polewalie Bagaimana pandangan Bapak Muliadi HS,S.pd sebagai kepala desa terhadap kebijakan yang telah diterapkan di Desa Poelewalie?

"Saya melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan ekonomi Desa Poelewalie. Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, saya yakin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat."

Berdasarkan wawancara diatas memiliki pandangan positif terhadap kebijakan tersebut, memahami tujuannya untuk meningkatkan ekonomi desa, dan merasa yakin dapat memberikan kontribusi positif melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Wawancara dengan ketua BUMDes Desa Polewalie Sundari, SE Sejauh mana Anda sebagai ketua BUMDes merasa memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan Simpan Pinjam ini dengan sungguh-sungguh?

"Saya merasa sangat memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan Simpan Pinjam ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya ini dapat menjadi dorongan ekonomi yang signifikan untuk desa."

Berdasarkan wawancara diatas tidak hanya bersedia melaksanakan kebijakan Simpan Pinjam, tetapi juga memiliki keyakinan kuat bahwa kebijakan ini dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi desa, menunjukkan keterlibatan dan komitmen yang tinggi.

Wawancara dengan bendahara BUMDes Firman, S.Pd Bagaimana disposisi Anda sebagai bendahara dalam mengelola keuangan terkait Program Simpan Pinjam BUMDes?

"Sebagai bendahara, saya merasa sangat bersemangat dalam mengelola keuangan terkait Program Simpan Pinjam BUMDes. Ini adalah tanggung jawab besar yang saya emban dengan penuh dedikasi."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa bendahara merasa sangat bersemangat dan berkomitmen penuh dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait Program Simpan Pinjam BUMDes. Kebersemangatan ini mencerminkan tekad untuk menjaga keseimbangan keuangan dengan baik demi keberhasilan program dan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara dengan sekretaris BUMDes Muhammad Ilham, ST Desa Polewalie Sejauh mana pemahaman dan pengetahuan Anda tentang kebijakan ini memengaruhi disposisi untuk melaksanakannya sebagai sekretaris?

"Pemahaman saya terhadap kebijakan ini sangat memengaruhi disposisi saya sebagai sekretaris. Saya berusaha untuk menyusun dokumen dan mengelola administrasi dengan sebaik mungkin."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemahaman mendalam terhadap kebijakan memberikan landasan bagi sikap positif dan komitmen sekretaris untuk menjalankan tugas administratifnya dengan penuh dedikasi dan kualitas yang tinggi.

Wawancara dengan masyarakat Rasida, Bagaimana persepsi dan disposisi masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Poelewalie?

"Sejauh ini, masyarakat melihat Program Simpan Pinjam BUMDes dengan disposisi positif. Mereka merasa bahwa ini membuka peluang ekonomi dan kesejahteraan bagi mereka."

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat memiliki pandangan positif terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Pernyataan ini juga mencerminkan dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap inisiatif tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan, dimana struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bagaimana peran Kepala Desa bapak Muliadi NS, S.Pd dalam memastikan bahwa struktur birokrasi di Desa Poelewalie mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan?

"Tentu, sebagai Kepala Desa, peran saya dalam memastikan bahwa struktur birokrasi di Desa Poelewalie mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan sangatlah vital. Beberapa langkah konkret yang telah saya ambil untuk menjalankan peran ini antara lain:

Perancangan Struktur Organisasi:

Saya terlibat secara langsung dalam perancangan struktur organisasi desa. Ini mencakup penentuan unit-unit kerja, pembagian tugas, dan pemberian tanggung jawab kepada staf dan perangkat desa sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi Antar Departemen:

Saya memastikan adanya koordinasi yang efektif antardepartemen dalam struktur birokrasi. Ini melibatkan rapat rutin, pertemuan koordinasi, dan saling berkomunikasi untuk memastikan semua pihak terinformasi dan berkolaborasi dengan baik.

Pemantauan dan Evaluasi Berkala:

Saya secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja struktur birokrasi. Ini membantu kami mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Fasilitasi Komunikasi dengan Masyarakat:

Saya memfasilitasi komunikasi yang efektif antara struktur birokrasi dan masyarakat. Pertemuan-pertemuan terbuka, forum diskusi, dan mekanisme umpan balik digunakan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terdengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan.

Pendorong Partisipasi Masyarakat:

Saya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup penyelenggaraan pertemuan konsultasi publik dan kegiatan partisipatif lainnya untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas menggambarkan tindakan konkret yang diambil untuk memastikan struktur birokrasi di Desa Poelewalie berperan efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkah tersebut melibatkan perancangan struktur organisasi yang sesuai, koordinasi yang efektif antardepartemen, pemantauan kinerja secara rutin, fasilitasi komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan pendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Kepala Desa berupaya menciptakan lingkungan birokrasi yang responsif, transparan, dan terlibat secara aktif dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Wawancara dengan ketua BUMDes Sundari, SE Bagaimana struktur birokrasi BUMDes mendukung pelaksanaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya?

"Struktur birokrasi BUMDes dirancang untuk mendukung pelaksanaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya dengan menyediakan unit khusus, SOP yang jelas, koordinasi internal aktif, pelatihan anggota, dan implementasi sistem informasi manajemen. Dengan cara ini, kami memastikan efisiensi, transparansi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut."

Berdasarkan wawancara diatas Makna dari wawancara tersebut adalah bahwa struktur birokrasi BUMDes telah dirancang dengan tujuan khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya. Beberapa langkah konkret yang diambil, seperti penyediaan unit khusus, SOP yang jelas, koordinasi internal yang aktif, pelatihan anggota, dan implementasi sistem informasi manajemen, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUMDes berkomitmen untuk menjalankan program dengan cara yang optimal, sesuai dengan standar operasional, dan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Wawancara dengan Bendahara BUMDes Firman, S.Pd Bagaimana struktur birokrasi membantu Bendahara BUMDes dalam mengelola keuangan terkait Program Simpan Pinjam?

"Struktur birokrasi BUMDes memberikan dukungan signifikan kepada Bendahara dalam mengelola keuangan terkait Program Simpan Pinjam. Kami telah merancang prosedur keuangan yang terstruktur, memastikan pemantauan transparan setiap transaksi, dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko. Dengan ini, Bendahara dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, menjaga keberlanjutan program, dan memastikan keuangan BUMDes dalam kondisi yang sehat."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa struktur birokrasi BUMDes memiliki peran penting dalam memberikan dukungan yang signifikan kepada Bendahara. Langkah-langkah konkret seperti perancangan prosedur keuangan yang terstruktur, pemantauan transparan setiap transaksi, dan implementasi kebijakan pengelolaan risiko bertujuan untuk memberikan lingkungan yang memudahkan Bendahara dalam mengelola keuangan terkait Program Simpan Pinjam. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas Bendahara, tetapi juga menjaga keberlanjutan program dan kesehatan keuangan BUMDes secara keseluruhan. Dengan demikian, BUMDes berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan baik untuk mendukung kesuksesan Program Simpan Pinjam.

Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Muhammad Ilham, ST :
Bagaimana struktur birokrasi mendukung tugas-tugas administratif dan dokumentasi yang dilakukan oleh Sekretaris BUMDes?

"Struktur birokrasi BUMDes mendukung tugas-tugas administratif dan dokumentasi Sekretaris dengan menyediakan unit administrasi yang berfokus pada penyusunan dokumen, pemeliharaan arsip, dan pelaksanaan SOP terkait. Koordinasi yang baik antarunit memastikan informasi akurat, memudahkan tugas administratif, dan mendukung transparansi dalam pengelolaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya."

Struktur birokrasi BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas administratif dan dokumentasi yang dilakukan oleh Sekretaris. Dengan menyediakan unit administrasi yang memiliki fokus khusus pada penyusunan dokumen, pemeliharaan arsip, dan pelaksanaan SOP terkait, BUMDes menciptakan lingkungan yang memfasilitasi tugas administratif Sekretaris. Koordinasi yang baik antar unit di dalam struktur birokrasi membantu dalam menyediakan informasi yang akurat, mempermudah tugas administratif, dan secara keseluruhan mendukung transparansi dalam pengelolaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen BUMDes untuk menjalankan kegiatan administratif dengan efisien dan transparan demi keberhasilan program dan kepuasan masyarakat.

Wawancara dengan Masyarakat Rasida Bagaimana persepsi masyarakat terhadap struktur birokrasi yang ada di Desa Poelewalie?

"Persepsi masyarakat terhadap struktur birokrasi di Desa Poelewalie sangat positif. Masyarakat merasa bahwa struktur ini mendukung keterlibatan aktif, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Mereka menganggapnya sebagai elemen kunci dalam

pelaksanaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya yang memberikan dampak positif bagi kemajuan desa."

Berdasarkan wawancara diatas adalah bahwa masyarakat Desa Poelewalie memiliki pandangan yang sangat positif terhadap struktur birokrasi yang ada di desa mereka. Mereka percaya bahwa struktur tersebut memberikan dukungan yang kuat untuk keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Struktur birokrasi dianggap sebagai elemen kunci yang memberikan dampak positif bagi kemajuan desa, khususnya dalam pelaksanaan Program Simpan Pinjam dan kebijakan lainnya. Wawancara tersebut mencerminkan bahwa struktur birokrasi Desa Poelewalie dianggap efektif dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat serta memberikan dampak positif pada perkembangan desa secara keseluruhan.

- **Implementasi program simpan pinjam bumdes untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat**

Adapun hasil Wawancara dengan masyarakat desa polewalie.

1. Tentang Kebutuhan dan Harapan Masyarakat dengan ibu Rasida

Bagaimana Anda melihat kebutuhan utama masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Poelewalie?

Kebutuhan utama masyarakat kami di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Poelewalie mencakup akses modal yang lebih mudah, peningkatan pengetahuan teknis, infrastruktur pertanian yang lebih baik, dan dukungan dalam pemasaran produk. Kami percaya bahwa program simpan pinjam BUMDes dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami.

2. Partisipasi Petani, Pemilik Kebun, dan Peternak dengan bapak kepala desa Muliadi HS, S.Pd

Sejauh mana petani, pemilik kebun, dan peternak di Desa Poelewalie berpartisipasi dalam program simpan pinjam BUMDes?

Partisipasi petani, pemilik kebun, dan peternak di Desa Poelewalie dalam program simpan pinjam BUMDes cukup positif. Sebagian besar dari mereka telah mendaftar sebagai anggota dan aktif dalam kegiatan program. Namun, masih ada tantangan untuk meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan pemilik kebun dan peternak kecil. Kami sedang bekerja keras untuk memberikan pemahaman lebih baik dan insentif agar partisipasi semakin meluas.

3. Pelatihan dan Pendidikan dengan ketua BUMDes Sundari, SE:

Bagaimana program ini mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan?

Program ini menyediakan pelatihan intensif kepada masyarakat sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Poelewalie. Pelatihan mencakup teknik pertanian modern, manajemen kebun, dan pemeliharaan ternak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan usaha pertanian, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

4. Alokasi Dana untuk Sektor Pertanian Dengan Bendahara BUMDes

Firman, S.Pd:

Bagaimana alokasi dana program simpan pinjam BUMDes untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Poelewalie?

Sebagian besar alokasi dana program simpan pinjam BUMDes diarahkan secara khusus untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Poelewalie. Dana tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang bersaing kepada petani,

pemilik kebun, dan peternak. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk pelatihan teknis, penyediaan bibit unggul, dan perbaikan infrastruktur pertanian. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Poelewalie memiliki kebutuhan utama di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mencakup akses modal, peningkatan pengetahuan teknis, infrastruktur pertanian yang lebih baik, dan dukungan dalam pemasaran produk. Program simpan pinjam BUMDes telah mendapatkan respons positif dari petani, pemilik kebun, dan peternak dengan partisipasi yang cukup baik. Program ini memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat dalam sektor tersebut. Alokasi dana program simpan pinjam BUMDes difokuskan secara khusus untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian dengan memberikan pinjaman, pelatihan, dan perbaikan infrastruktur. Program ini bertujuan memberikan dampak maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Poelewalie.

C. Pembahasan

Penyajian data dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, serta data dan dokumen yang menunjang penelitian Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan

jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Polewalie beserta anggota BUMDes dalam implementasi program simpan pinjam (SPP) adalah dengan cara sosialisasi, dimana kepala desa dan anggota BUMDes mensosialisasikan program simpan pinjam tersebut pada saat musyawarah desa dalam merumuskan rencana kerja BUMDes dan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang dihadiri oleh pemerintah desa, kepala dusun, kelompok tani, PKK, para guru, dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah.

Kepala desa menjelaskan bahwa implementasi program simpan pinjam akan ditetapkan sebagai kegiatan tetap yang akan dijalankan oleh BUMDes guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik itu dibidang pertanian, peternakan, usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga disaat masyarakat bingung untuk mendapatkan dana darurat bisa langsung berhubungan dengan BUMDes.

Masyarakatpun terlihat sangat antusias dengan program simpan pinjam (SPP) ini, masyarakat sangat merasakan kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakatnya.

2. Sumber Daya

Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasipun cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (staf) harus cukup dan cakap. Artinya bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap.

Sumber daya anggaran, Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayan yang diberikan kepada masyarakat. Sumber daya fasilitas, fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, menurut Edward dalam Winarno, ada dua bentuk informasi yang pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Bentuk kedua yaitu informasi berupa data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Kewenangan adalah sumber daya berikutnya yang ikut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ketika institusi dihadapkan pada masalah yang memerlukan penanganan yang cepat maka kewenangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Untuk menunjang keberhasilan implementasi program simpan pinjam (SPP) di Desa Polewalie ini, digunakan sumber daya manusia yang telah di atur dalam struktur organisasi BUMDes yaitu sebagai berikut :

Komisaris	: Mulyadi HS. S,Pd
Direktur	: Sundari, S.E
Bagian Administrasi (Administrasi)	: Nurul Amelia
Urusan Keuangan (Bendahara)	: Firman, S.Pd
Unit Usaha Pelayanan Umum dan Jasa	: Monika

3. Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Sesuai dengan yang terjadi pada musyawarah desa yang telah terjadi baik pemerintah desa, anggota BUMDes, dan Masyarakat sangat antusias dengan program Simpan Pinjam (SPP) ini karena merupakan media bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tujuannya yaitu mensejahterahkan masyarakat dan masyarakatpun merasa terbantu dengan tersedianya sarana simpan pinjam ini. Sehingga Kepala Desa selaku pemangku pemerintahan desa tertinggi menetapkan program Simpan Pinjam (SPP) ini sebagai program tetap yang akan dijalankan oleh BUMDes di desa Polewalie.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalannya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

★ Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi atau penerapan suatu kebijakan, dimana struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Secara struktur birokrasi BUMDes di Desa Polewalie sudah berjalan dengan baik, meliputi struktur organisasi dan anggota pengurus BUMDes sebagaimana tertuang dalam surat kuasa BUMDes yang telah disahkan pada tanggal 26 Januari 2022 yang didalamnya telah diatur sebagai berikut:

5. Mengangkat dan menetapkan pengurus badan usaha milik desa (BUMDes)
6. Masa bakti kepengurusan badan usaha milik desa (BUMDes) desa polewalie selama 5 tahun dihitung sejak ditetapkan.
7. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus sesuai peraturan d esa polewalie nomor 4 tahun 2016
8. Adapun pembagian honorium berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.
9. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

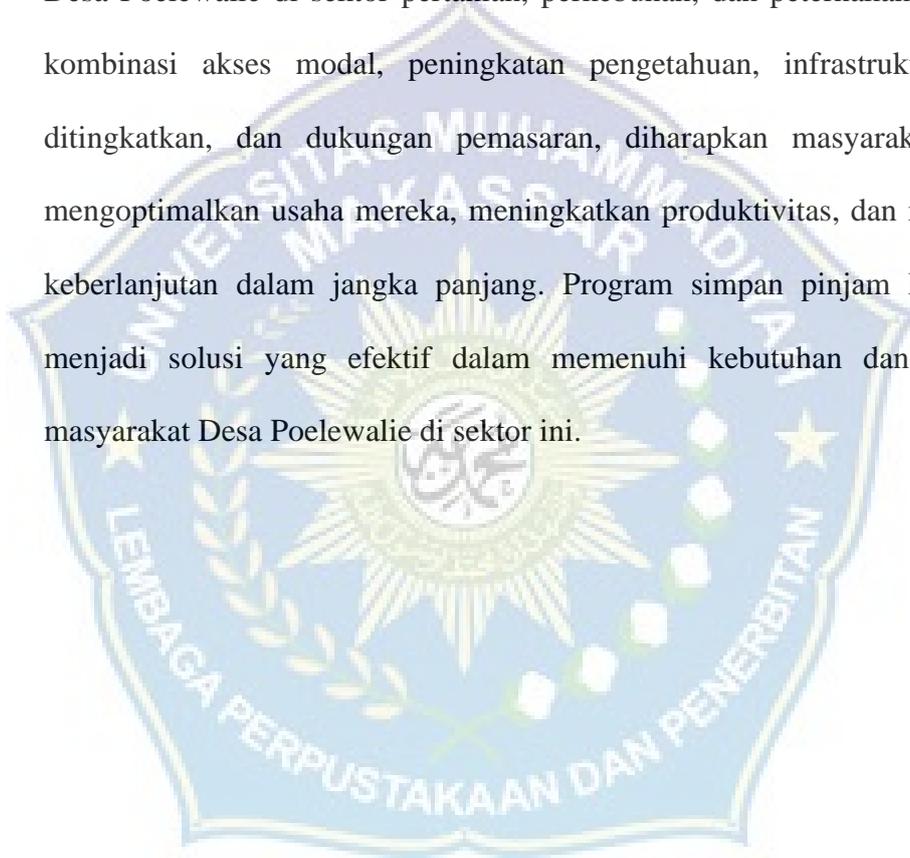
5. Ekonomi masyarakat

Desa Poelewalie menghadapi beberapa kebutuhan utama di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kebutuhan tersebut mencakup akses modal yang lebih mudah, peningkatan pengetahuan teknis, infrastruktur pertanian yang lebih baik, dan dukungan dalam pemasaran produk. Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, program simpan pinjam BUMDes telah berhasil mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama petani, pemilik kebun, dan peternak, yang aktif berpartisipasi dalam program tersebut.

Program ini juga telah memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Alokasi dana program simpan

pinjam BUMDes secara khusus difokuskan untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian, melibatkan pemberian pinjaman dengan suku bunga yang bersaing, pelatihan teknis, dan perbaikan infrastruktur pertanian.

Dengan demikian, program ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan dampak maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Poelewalie di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Melalui kombinasi akses modal, peningkatan pengetahuan, infrastruktur yang ditingkatkan, dan dukungan pemasaran, diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Program simpan pinjam BUMDes menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Poelewalie di sektor ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam skripsi ini, peneliti telah melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa program Simpan Pinjam (SPP) BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

1. Secara komunikasi yaitu koordinasi dan komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu program Simpan Pinjam (SPP) BUMDes di Desa Polewalie secara berkala telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga komunikasi dalam Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) disemua pihak sudah berjalan dengan baik.
2. Secara sumber daya dalam hal ini anggota BUMDes di Desa Polewalie telah dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dibutuhkan dalam program kerjanya yaitu Simpan Pinjam (SPP), sehingga sumber daya manusia dalam Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) sudah cukup baik untuk saat ini.
3. Disposisi atau sikap, pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Simpan Pinjam (SPP) dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai aturan yang disepakati.

Dengan ini Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) di Desa Polewalie dapat terus berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi, secara struktur birokrasi BUMDes di Desa Polewalie sudah berjalan dengan baik, meliputi struktur organisasi, pengurus, dan Nasabah Program Simpan Pinjam (SPP).
5. Secara keseluruhan, Program SPP BUMDes tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Polewalie.

Dari kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie sudah sangat baik dan memadai.

B. Saran

1. Bagi Pengurus BUMDes sekiranya tetap menjaga hubungan baik kepada anggota masyarakat dan Nasabah Simpan Pinjam (SPP)
2. Bagi pengurus BUMDes agar kedepannya dapat membuka program baru lainnya yang dapat membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya dan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, solichin, 2005. Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: bumi aksara
- Abdul Ghani, 2017. Manajemen komunikasi marketing. Bandung. Pustaka pelajar
- Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Eko putro widoyoko, 2016. Evaluasi program pembelajaran panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2004. Pembangunan ekonomidisi kesebelas. Jakarta. Erlangga
- Nurdin Usm,2002. Konteks implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: Grasindo
- Nadia Khairia.” 2022. implementasi program badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa kemang kecamatan tambang kabupaten kampar.
- Nurdin Usman. 2002. Implementasi Berbasis Kurikulum Bandung CV Sinar.
- Nurfajria. 2021. Pengaruh Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir.
- Nugroho, 2009. Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Rusman, 2017. Belajar & pembelajaran berorientasi standar proses Pendidikan. Jakarta: kencana
- Rostiana,E & Djulis, H, 2018. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Yogyakarta. Diandra Kreatif
- Syaukani, at all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2016. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. bandung: Pt.alfabet
- Tachjan, 2006. Implementasi kebijakan public. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Nova Anggraeni,dkk. Perancangan informasi simpan pinjam di KUD mandiri bayongbong, Jurnal Algoritma, vol 9 No 5

Widyoko, Eko Putro, 2016. Teknik penyusunan instrumen penelitian. Yogyakarta. Pustaka pelajar

Zulkarnain Ridlwan. 2014. Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa. Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 3 hlm 432

Zumrotus, L., & Susiantoro, A. (n.d.). Implementasi Program Bumdes Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Desa Papar, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) Yusuf Hariyoko.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>

<https://lifepal.co.id/media/bumdes/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/141551369/tahapan-keluarga-sejahtera-dan-indikatornya?page=all#page3>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>

<https://www.bumdesamutiarawelirang.com/2022/12/kenali-4-sumber-dana-untuk-biyai-bumdes-anda.html>

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Pengurus BUMDes Desa Polewalie.



Wawancara Kepala Desa Polewalie



Wawancara Ketua BUMDes Desa Polewalie



Wawancara Bendahara BUMDes Desa Polewalie

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Polewalie.



Wawancara Masyarakat Desa Polewalie



Wawancara Masyarakat Desa Polewali



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 2001/FSP/A.6-VIII/VII/1444H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

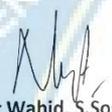
Nama Mahasiswa : Sahrul Ramdana
Stambuk : 105611110418
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor BUMDes Polewalie, Kecamatan Gilireng.
Judul Skripsi : **"Implementasi Program Simpan Pinjam Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo"**

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1891/05/C.4-VIII/VII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Dzulhijjah 1444 H
11 July 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2001/FSP/A.6-VIII/VII/1444 H/2023 M tanggal 11 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SAHRUL RAMDANA
No. Stambuk : 10561 1110418
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Juli 2023 s/d 14 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



 PTSPWJ IP1070127																	
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website : dpmptsp.wajokab.go.id , Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com																	
<u>IZIN PENELITIAN / SURVEY</u> NOMOR : 2655/IP/DPMPTSP/2023																	
Membaca	: Surat Permohonan SAHRUL RAMADANA Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey																
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan. 																
Memperlihatkan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 1891/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Perihal IZIN PENELITIAN 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 02719/IP/TIM-TEKNIS/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey 																
Menetapkan	: Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nama</td> <td>: SAHRUL RAMADANA</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: Polewalie, 15 Desember 1999</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Polewalie, Kecamatan Gilireng</td> </tr> <tr> <td>Perguruan Tinggi/Lembaga</td> <td>: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</td> </tr> <tr> <td>Jenjang Pendidikan</td> <td>: S1</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM (SPP) BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Penelitian</td> <td>: DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Penelitian</td> <td>: 21 Juli 2023 s/d 21 Agustus 2023</td> </tr> </table>	Nama	: SAHRUL RAMADANA	Tempat/Tanggal Lahir	: Polewalie, 15 Desember 1999	Alamat	: Polewalie, Kecamatan Gilireng	Perguruan Tinggi/Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	Jenjang Pendidikan	: S1	Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM (SPP) BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO	Lokasi Penelitian	: DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO	Jangka Waktu Penelitian	: 21 Juli 2023 s/d 21 Agustus 2023
Nama	: SAHRUL RAMADANA																
Tempat/Tanggal Lahir	: Polewalie, 15 Desember 1999																
Alamat	: Polewalie, Kecamatan Gilireng																
Perguruan Tinggi/Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR																
Jenjang Pendidikan	: S1																
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM (SPP) BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO																
Lokasi Penelitian	: DI DESA POLEWALIE, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO																
Jangka Waktu Penelitian	: 21 Juli 2023 s/d 21 Agustus 2023																
Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan 2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah. 3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat. 																	
Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 21 Juli 2023																	
Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,   H. NARWIS, S.E., M.Si. Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 196507151994031011																	
No. Reg : 3693/IP/DPMPTSP/2023 Retribusi : Rp.0.00																	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Prurul Ramadanana 105611110418 BAB I

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

turnitin

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Ambar 10% 75%

0% SIMILARITY INDEX **0%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LULUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Ambar 10% 75%

4% SIMILARITY INDEX **4%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **2%** STUDENT PAPERS

ORIGINALITY REPORT

F

Ambar 10% 75%

LULUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1 **www.jurnal.socialsecurity.com** 1%
Internet Source

2 **Submitted to Sriwijaya University** 1%
Student Paper

3 **digilib.uinsby.ac.id** 1%
Internet Source

4 **digilibadmin.unismuh.ac.id** 1%
Internet Source

5 **entaksaeroji.blogspot.com** <1%
Internet Source

6 **Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung** <1%
Student Paper

7 **Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang** <1%
Student Paper

8 **etheses.uin-malang.ac.id** <1%
Internet Source

122dek.com

SOURCES

Arul Ramadana 105611110418 BAB III

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX

2% INTERNET SOURCES

1% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	Lidya Y Turangan, M A.V Manese, S P Pangemanan. "KONTRIBUSI USAHA TERNAK ITIK PETELUR TERHADAP PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI PETERNAK DI KECAMATAN LANGOWAN TIMUR", ZOOTEK, 2019 Publication	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

nrul Ramadana 105611110418 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	8%
2	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
3	voxntt.com Internet Source	<1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
5	docobook.com Internet Source	<1%
6	marketplace.jojonomic.com Internet Source	<1%
7	kotakpintar.com Internet Source	<1%
8	pt.scribd.com Internet Source	<1%



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sahrul Ramadana

Nim : 105611110418

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad H. Hum, M.I.P
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Sahrul Ramadana, lahir di Gilireng pada tanggal 15 Desember 1999. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, anak kandung dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Rasaida. Penulis memulai jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 52 Polewalie Kabupaten Wajo dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gilireng dan selesai pada tahun 2015. Kemudian Tahun 2015 melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Wajo dan selesai pada tahun 2018. Berkat dorongan dan support orang terdekat penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Strata satu (1). Kegiatan organisasi yang pernah di ikuti yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo.

Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah di berikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan semangat yang tinggi dan motivasi dari orang-orang sekitar, penulis berusaha dan belajar dengan baik hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di tahun 2024 dengan judul skripsi **“Implementasi Program Simpan Pinjam (SPP) BUMdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”**. Hingga Saat ini penulis mengharapkan dapat

memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama mengamban pendidikan serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara

